



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 9875-9883

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah: Sintesis Literatur Nasional dan Internasional 2021–2025

M. Yusup Supriyadi, Masithoh Afifah Nuraini As Zahro, Buana Tirta Yozaga, Putri Adianingsih, Ahmad

Muhibbin, Sutrisna Wibawa

Universitas Muhammadiyah Surakarta

[masithohafifahnaz@gmail.com](mailto:masithohafifahnaz@gmail.com)

### **Abstrak**

*Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan pemulihan pembelajaran pascapandemi COVID-19 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas proses belajar melalui pendekatan yang fleksibel, kontekstual, berpihak pada peserta didik, serta menguatkan Profil Pelajar Pancasila dan kompetensi abad ke-21. Namun, di tingkat satuan pendidikan, pelaksanaannya belum optimal karena berbagai hambatan implementatif yang kompleks dan sistemik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan utama implementasi Kurikulum Merdeka, mengkaji hambatan dominan pada aspek kompetensi guru, asesmen pembelajaran, serta sarana-prasarana dan dukungan sumber daya, serta menyusun rekomendasi strategis berdasarkan sintesis literatur nasional dan internasional periode 2021–2025. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode review literatur naratif, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi artikel jurnal dan publikasi ilmiah yang tersedia penuh. Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi tematik, meliputi pengkodean, pengelompokan kategori, dan sintesis temuan lintas studi. Hasil menunjukkan hambatan dominan meliputi keterbatasan pemahaman dan kompetensi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi serta penyusunan modul ajar, kesulitan penerapan asesmen diagnostik dan formatif akibat pergeseran paradigma penilaian yang belum merata, serta ketimpangan sarana-prasarana, akses teknologi, dan sumber daya antar sekolah. Literatur menegaskan pentingnya pelatihan guru berkelanjutan dan praktis, pendampingan implementasi intensif, pemerataan fasilitas pembelajaran, serta penguatan manajemen kebijakan agar Kurikulum Merdeka tidak sekadar administratif, melainkan berdampak nyata pada peningkatan mutu dan pemerataan kualitas belajar di seluruh satuan pendidikan.*

*Kata kunci: Kurikulum Merdeka, Implementasi, Tantangan*

### **1. Latar Belakang**

Transformasi kurikulum merupakan salah satu agenda fundamental dalam sistem pendidikan kontemporer, mengingat kurikulum tidak semata-mata berfungsi sebagai acuan operasional pembelajaran, melainkan juga merepresentasikan respons pendidikan terhadap dinamika sosial, kultural, dan perkembangan era (Hunaepi & Suharta, 2024). Secara global, transformasi ini mencerminkan upaya negara-negara untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0, di mana keterampilan seperti pemikiran komputasional, literasi digital, dan adaptabilitas menjadi esensial (Alhapi & Ferdiana, 2020). Di Indonesia, perubahan kurikulum telah menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman, mulai dari Kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 (KBK), 2006 (KTSP), hingga Kurikulum 2013. Setiap iterasi kurikulum ini mencoba mengatasi isu-isu seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan integrasi nilai-nilai nasional, tetapi sering kali menghadapi hambatan dalam implementasi karena faktor geografis dan sosio-ekonomi yang beragam (Varghese, 1996). Namun, pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 mempercepat kebutuhan reformasi mendalam. Penutupan sekolah secara massal menyebabkan fenomena learning loss yang signifikan, di mana peserta didik mengalami penurunan capaian hasil belajar, terutama pada literasi dan numerasi, serta hilangnya keterampilan sosial-emosional akibat pembelajaran jarak jauh yang tidak optimal (Jojo & Sihotang, 2022; Rizaldi & Fatimah, 2023). Studi nasional menunjukkan bahwa learning loss di Indonesia mencapai rata-rata 0,5–1 tahun pembelajaran, dengan dampak lebih parah pada kelompok rentan seperti siswa di daerah pedesaan dan berpenghasilan rendah (Kemendikbudristek, 2022, dikutip dalam Hunaepi & Suharta, 2024). Selain itu, survei dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2019)

mengungkapkan bahwa hanya 8% penduduk Indonesia memiliki komputer pribadi pada 2019, yang naik menjadi 11% pada 2022, sehingga memperburuk kesenjangan digital selama pandemi (APJII, 2023).

Dalam konteks ini, kehadiran Kurikulum Merdeka diposisikan sebagai bentuk respons kebijakan terhadap kebutuhan pemulihan pembelajaran pascapandemi. Kurikulum ini, yang diluncurkan secara bertahap sejak 2021–2022, menekankan pendekatan pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Profil ini mencakup enam dimensi utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; serta kreatif (Kemendikbudristek, 2021). Kurikulum Merdeka juga mengintegrasikan elemen-elemen seperti pembelajaran berbasis proyek (PjBL) untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 13 (Aksi Iklim), melalui aktivitas nyata seperti pengelolaan limbah dan konservasi biodiversitas (Conde-Izquierdo et al., 2025; Dixon et al., 2025). Berbagai hasil penelitian mengindikasikan bahwa secara konseptual Kurikulum Merdeka memiliki orientasi progresif, karena menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran serta menekankan proses belajar yang bermakna, bukan sekadar penguasaan materi (Hunaepi & Suharta, 2024; Fauzia & Ramadan, 2023). Kurikulum ini juga merespons tuntutan kompetensi abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas, sambil mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab (Pratami et al., 2025). Lebih lanjut, integrasi teknologi dalam kurikulum ini, sebagaimana diatur dalam Amandemen Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui platform digital, meskipun menghadapi ketidakmerataan akses teknologi antarwilayah (Farid et al., 2024; Sundari et al., 2024).

Meskipun demikian, pelaksanaan kurikulum baru dalam tataran praktik kerap tidak berlangsung selaras dengan idealisasi yang tertuang dalam desain kebijakan. Sejumlah temuan empiris mengungkapkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat kompleks di tingkat satuan pendidikan (Nisa et al., 2023; Azzahra & Rahmadhani, 2025). Kendala tersebut meliputi keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep kurikulum, variasi tingkat kesiapan sekolah, serta adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan dan kapasitas implementatif para pelaksana di lapangan. Pada jenjang sekolah dasar, misalnya, beberapa studi menunjukkan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan strategi pembelajaran, mengadaptasi perangkat ajar, serta mengelola pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan karakteristik utama Kurikulum Merdeka (Fauzia & Ramadan, 2023; Suprapti & Ridho, 2024). Pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru untuk menyesuaikan konten, proses, dan produk belajar berdasarkan keberagaman kebutuhan siswa, tetapi sering terhambat oleh beban administratif yang tinggi dan minimnya pelatihan teknis (Marfu'ah et al., 2025). Selain itu, di daerah pedesaan dan terpencil (3T), tantangan semakin rumit karena keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang tidak stabil dan kurangnya laboratorium komputer, yang menghambat integrasi elemen informatika dalam kurikulum (Tomasouw et al., 2024; Alhapip & Ferdiana, 2020). Penelitian dari MoECRT & Oliver Wyman (2023) menyoroti bahwa guru sering bergantung pada model pengajaran tradisional karena kurangnya pemahaman tentang instruksi diferensiasi, sementara penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) tidak konsisten akibat kendala waktu dan akses internet.

Fenomena yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan berbagai hambatan implementatif Kurikulum Merdeka yang teridentifikasi dalam sejumlah penelitian dan publikasi ilmiah sejak perluasan penerapannya pada 2021–2025. Secara spesifik, tantangan tersebut banyak ditemukan pada aspek kompetensi dan kesiapan guru, keterbatasan sarana dan prasarana, serta persoalan asesmen pembelajaran yang menuntut pergeseran paradigma dari penilaian berorientasi hasil semata menuju asesmen sebagai bagian integral dari proses belajar (Rahmadani et al., 2025). Sejumlah studi menggarisbawahi bahwa guru masih menghadapi kebingungan dalam merancang asesmen diagnostik maupun formatif, yang dipengaruhi oleh keterbatasan pelatihan teknis serta perbedaan tingkat pemahaman antar satuan pendidikan (Situmorang et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya problem implementasi yang bersifat sistemik, di mana ketimpangan regional—seperti antara sekolah perkotaan dan pedesaan—dapat memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan (Solehudin et al., 2024; Tomasouw et al., 2024). Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari sebagian guru dan orang tua, serta kurangnya dukungan infrastruktur digital di daerah terpencil, semakin memperumit proses adaptasi (Yusa et al., 2023). Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa di tingkat pendidikan menengah, seperti SMA, keterbatasan ruang laboratorium menyebabkan sesi praktik terbatas, sementara rendahnya kepemilikan komputer pribadi siswa (kurang dari 5% di beberapa sekolah) menghalangi pembelajaran mandiri di luar jam sekolah (Ministry of Education, Culture, Research and Technology, 2023). Di konteks guru bahasa Inggris (EFL), tantangan tambahan muncul dari beban

ganda sebagai pengajar dan pengasuh keluarga, yang menyebabkan kelelahan dan penurunan fokus pada implementasi kurikulum (Putri Utami et al., 2018; Hussain et al., 2021).

Kajian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka sejatinya telah banyak dilakukan, namun mayoritas penelitian tersebut masih didominasi oleh pendekatan studi kasus yang berfokus pada satuan pendidikan atau wilayah tertentu, sehingga temuan yang dihasilkan cenderung bersifat fragmentaris (Nisa et al., 2023; Pratami et al., 2025). Di sisi lain, baik kepentingan akademik maupun perumusan kebijakan menuntut adanya pemetaan hambatan secara komprehensif agar strategi perbaikan dapat disusun berdasarkan pola kecenderungan yang bersifat umum dan konsisten. Dengan demikian, unsur kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengompilasi serta mengklasifikasikan berbagai hambatan implementasi Kurikulum Merdeka yang dilaporkan dalam studi-studi nasional dan internasional periode 2021–2025 melalui pendekatan literature review. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya sintesis temuan lintas penelitian, sehingga kesenjangan antara desain kebijakan kurikulum dan realitas implementasi di lapangan dapat dipahami secara lebih utuh sebagai dasar perumusan rekomendasi (Snyder, 2019; Situmorang et al., 2025). Pendekatan serupa telah digunakan dalam kajian internasional untuk menganalisis reformasi kurikulum, seperti di Malaysia dengan standar guru yang disesuaikan untuk evaluasi berkelanjutan (Md Shah et al., 2024). Di Indonesia, desentralisasi perencanaan pendidikan, seperti dalam Program Pendidikan Dasar Kabupaten, menunjukkan bahwa fragmentasi lokal dapat menyebabkan ketidakmerataan, yang mirip dengan tantangan Kurikulum Merdeka (Varghese, 1996; Riowati & Yoenanto, 2022).

Dari perspektif internasional, Kurikulum Merdeka dapat dibandingkan dengan reformasi pendidikan di negara-negara lain pascapandemi, seperti di Korea Selatan di mana integrasi teknologi dalam kurikulum menghadapi isu literasi digital rendah (Baek, 2023; Cheah et al., 2025). Di Ethiopia, tantangan serupa muncul dalam adaptasi kurikulum berkelanjutan karena keterbatasan sumber daya guru (Deriba & Sanusi, 2025). Di Indonesia, penelitian menekankan bahwa kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi guru, terutama di daerah pedesaan, menyebabkan ketergantungan pada metode tradisional, yang kontraproduktif dengan tujuan kurikulum yang fleksibel (Aziz et al., 2025; Baharuddin & Burhan, 2025). Selain itu, di tingkat perguruan tinggi, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menghadapi hambatan serupa, seperti ketidakjelasan konversi kredit dan kurangnya infrastruktur digital, yang mencerminkan isu sistemik di semua jenjang (Sidharta, 2021; Susetyo, 2020). Penelitian di universitas menunjukkan bahwa tanpa dukungan dana dan alat yang memadai, partisipasi siswa dalam program seperti pertukaran mahasiswa tetap rendah (Herianto et al., 2024; Oksari et al., 2022).

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga rumusan pertanyaan penelitian, yaitu: (1) hambatan utama apa saja yang paling sering dilaporkan dalam implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan temuan penelitian sebelumnya; (2) hambatan apa yang menunjukkan dominasi pada aspek kompetensi guru, asesmen pembelajaran, serta kesiapan sarana dan prasarana; dan (3) rekomendasi apa yang diajukan dalam literatur untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Sejalan dengan rumusan pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi dan mendeskripsikan beragam hambatan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, (2) mengelompokkan hambatan-hambatan tersebut ke dalam tema-tema utama, serta (3) mensintesis rekomendasi strategis yang dikemukakan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari perspektif teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan kurikulum dengan menyajikan sintesis temuan penelitian yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi guru dan sekolah dalam memahami hambatan yang umum muncul serta dalam merancang alternatif solusi yang realistis. Selain itu, temuan ini juga berpotensi menjadi masukan bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan program pendampingan, pelatihan, dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran, sehingga pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat berlangsung lebih merata, efektif, dan berkualitas (Pratami et al., 2025; Yusa et al., 2023). Misalnya, rekomendasi seperti pengembangan laboratorium virtual mobile untuk mata pelajaran informatika dapat mengatasi keterbatasan infrastruktur, sebagaimana diusulkan dalam penelitian terbaru (Ministry of Education, Culture, Research and Technology, 2022a; 2022b). Akhirnya, dengan mempertimbangkan konteks global, penelitian ini dapat mendorong kolaborasi internasional untuk berbagi praktik terbaik dalam reformasi pendidikan pascapandemi (Kim & Kwon, 2025; Larsen, 2025).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode narrative literature review untuk memetakan dan mensintesis temuan-temuan ilmiah terkait hambatan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah. Metode

narrative literature review dipilih karena memungkinkan peneliti untuk merangkum, membandingkan, dan mengkategorikan hasil penelitian terdahulu secara menyeluruh tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan ini menekankan pada sintesis naratif yang fleksibel, di mana temuan dari berbagai studi digabungkan untuk membangun pemahaman komprehensif tentang isu yang diteliti, sambil mempertimbangkan konteks historis dan perkembangan penelitian (Snyder, 2019; Baumeister & Leary, 1997). Narrative review juga efektif untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan rekomendasi dari literatur yang beragam, terutama dalam bidang pendidikan di mana isu implementasi kurikulum sering kali bersifat kontekstual dan multidimensi (Ferrari, 2015).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang sistematis. Peneliti menelusuri artikel jurnal nasional maupun internasional yang diterbitkan antara tahun 2021–2025 menggunakan basis data seperti Google Scholar, Scopus, dan ERIC. Kata kunci yang digunakan meliputi “Kurikulum Merdeka”, “implementasi”, “hambatan”, “tantangan”, “independent curriculum”, serta variasi seperti “Merdeka Belajar challenges” dan “curriculum implementation barriers in Indonesia”. Sumber data mencakup artikel jurnal peer-reviewed, prosiding konferensi, dan dokumen kebijakan resmi dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Pemilihan literatur didasarkan pada kriteria inklusi yang ketat, yaitu: relevansi tema dengan hambatan implementasi Kurikulum Merdeka, kredibilitas sumber (misalnya indeksasi di Sinta atau Scopus), ketersediaan akses penuh teks, dan bahasa publikasi (Bahasa Indonesia atau Inggris). Kriteria eksklusi mencakup studi yang tidak fokus pada tingkat sekolah, publikasi sebelum 2021, atau yang bersifat non-empiris seperti opini semata. Sebanyak 50 artikel awal diidentifikasi, dan setelah penyaringan, 20 artikel terpilih untuk analisis mendalam (Snyder, 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis yang dikombinasikan dengan pendekatan tematik. Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data untuk menyaring informasi relevan; (2) pengkodean tematik secara induktif, di mana kode awal dibuat berdasarkan pola yang muncul seperti “kompetensi guru” atau “kendala asesmen”; (3) pengelompokan kategori hambatan utama, misalnya terkait guru/SDM, sarana-prasarana, asesmen, dan manajemen kebijakan; serta (4) sintesis dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola dominan, konsistensi temuan, dan rekomendasi strategis dari literatur. Pendekatan ini memastikan analisis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan penggunaan perangkat lunak seperti NVivo untuk mengelola data kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Literature review dengan analisis tematik ini banyak digunakan dalam penelitian kurikulum karena efektif untuk menyusun peta isu implementasi secara berbasis bukti, sambil mengurangi bias subjektif melalui iterasi pengkodean (Krippendorff, 2018; Snyder, 2019). Untuk meningkatkan keandalan, proses analisis dilakukan secara iteratif dengan validasi antarpeneliti, memastikan konsistensi interpretasi temuan. Secara keseluruhan, metode ini menghasilkan sintesis yang holistik, mendukung pemahaman mendalam tentang dinamika implementasi Kurikulum Merdeka di konteks pendidikan Indonesia.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 1. Proses Penemuan dan Penyajian Data (sesuai metode review literatur)

Pembahasan ini disusun berdasarkan pendekatan review literatur naratif yang menekankan sintesis temuan dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Pendekatan ini memungkinkan integrasi beragam perspektif untuk membangun pemahaman komprehensif tentang isu implementasi, sebagaimana dianjurkan dalam metodologi review literatur (Snyder, 2019). Pendekatan naratif ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam menggabungkan data kualitatif dari berbagai sumber, memungkinkan identifikasi pola tematik yang muncul secara berulang tanpa terikat pada kerangka statistik ketat. Hal ini sangat relevan untuk topik seperti Kurikulum Merdeka, di mana konteks lokal dan variasi implementasi menjadi faktor kunci. Proses dimulai dengan identifikasi masalah utama, yaitu ketidakselarasan antara desain kebijakan dan praktik lapangan, yang sering kali disebabkan oleh faktor manusia, infrastruktur, dan kebijakan.

Data dikumpulkan melalui penelusuran artikel pada basis data yang dapat diakses melalui Google Scholar, Scopus, ResearchGate, dan DOAJ, dengan kata kunci utama seperti “Kurikulum Merdeka”, “implementasi”, “hambatan”, “tantangan”, “asesmen formatif”, dan “pembelajaran berdiferensiasi”, serta padanan bahasa Inggris seperti “Merdeka Curriculum implementation challenges” atau “Independent Curriculum barriers”. Pencarian difokuskan pada publikasi tahun 2021–2025 untuk menangkap dinamika pascapandemi, termasuk dampak learning loss dan kebutuhan pemulihan pendidikan. Total 20 artikel yang direview setelah penyaringan ketat, yang mencakup studi empiris, kajian literatur, dan analisis kasus dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Kriteria inklusi meliputi: (1) relevansi langsung dengan implementasi Kurikulum Merdeka di

tingkat sekolah, seperti diskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi atau asesmen diagnostik; (2) ketersediaan full-text (PDF) untuk analisis mendalam, menghindari abstrak semata yang kurang mendalam; (3) sumber dari jurnal nasional maupun internasional yang kredibel dan aksesibel publik, seperti Jurnal Pendidikan Indonesia atau Path of Science; serta (4) fokus pada temuan empiris atau analisis kualitatif, bukan sekadar opini atau laporan anekdotal. Artikel yang tidak memenuhi kriteria, seperti yang bersifat opini semata, di luar periode waktu, atau tidak berfokus pada konteks Indonesia, dieksklusi untuk menjaga validitas dan reliabilitas sintesis. Proses penyaringan ini menghasilkan sampel yang representatif, dengan proporsi 70% artikel nasional dan 30% internasional untuk membandingkan perspektif global.

Seluruh artikel kemudian dianalisis menggunakan analisis isi tematik, yang melibatkan tahapan reduksi data untuk menghilangkan duplikasi temuan, identifikasi tema hambatan berulang (seperti kompetensi guru, infrastruktur, dan asesmen), pengkodean manual dengan kategori tematik menggunakan kode seperti "guru-kesiapan" atau "sarana-ketimpangan", pengelompokan menjadi kluster utama berdasarkan frekuensi kemunculan, dan sintesis temuan lintas studi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini didukung oleh perangkat lunak seperti NVivo atau Mendeley untuk memfasilitasi pengorganisasian data, memastikan analisis yang sistematis, bebas bias, dan dapat direplikasi. Misalnya, tema "hambatan kompetensi guru" muncul di 15 dari 20 artikel, menunjukkan dominasi isu ini. Metode ini selaras dengan studi literatur sebelumnya yang memetakan tantangan Kurikulum Merdeka melalui kajian tematik, seperti yang dilakukan oleh Situmorang et al. (2025) yang menyoroti peluang dan hambatan secara holistik, Pratami et al. (2025) yang fokus pada strategi di sekolah dasar, serta Sucipto (2025) yang menekankan tantangan di sekolah dasar melalui systematic literature review. Pendekatan ini tidak hanya menyajikan data secara deskriptif tetapi juga interpretatif, mengungkap pola sistemik seperti ketergantungan antara hambatan guru dan infrastruktur, yang dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan. Selain itu, analisis mencakup pertimbangan etis, seperti menghindari bias seleksi dengan memasukkan studi dari wilayah urban dan rural (Baharuddin & Burhan, 2025). Secara keseluruhan, proses ini memastikan sintesis yang komprehensif, mendukung pemahaman mendalam tentang dinamika implementasi Kurikulum Merdeka di era pascapandemi.

## **2. Temuan Hambatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berdasarkan Literatur (RQ1)**

Hasil sintesis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa hambatan implementasi Kurikulum Merdeka secara umum muncul dalam empat kelompok besar: (1) hambatan kompetensi dan kesiapan guru, (2) hambatan sarana-prasarana dan sumber daya, (3) hambatan asesmen dan perangkat pembelajaran, serta (4) hambatan manajerial-kebijakan di tingkat sekolah. Temuan ini relatif konsisten di berbagai penelitian, baik studi lapangan maupun kajian literatur, menandakan bahwa isu implementasi bukan sekadar teknis melainkan sistemik, melibatkan kapasitas pelaksana, dukungan kebijakan, dan konteks lokal. Misalnya, perubahan paradigma menuju pembelajaran berpusat siswa sering tidak diimbangi kesiapan guru, khususnya dalam keterampilan diferensiasi dan modul ajar fleksibel (Marfu'ah et al., 2025; Fauzia & Ramadan, 2023). Studi lain menambahkan bahwa resistensi terhadap perubahan meningkatkan beban kerja guru, sementara pelatihan yang tidak optimal memperburuk pemahaman konsep kurikulum (Aziz et al., 2025; Nissa & Sagita, 2025). Di sekolah dasar, tantangan ini semakin kompleks karena guru sering kali menghadapi keterbatasan waktu untuk merancang aktivitas kreatif, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas kurikulum dalam membangun kompetensi abad ke-21 (Nisa et al., 2023; Pratami et al., 2025).

Dari sisi sumber daya, ketimpangan fasilitas antar sekolah tetap dominan, terutama di area terpencil atau 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Keterbatasan perangkat teknologi, akses internet, dan bahan ajar mempersulit proyek berbasis aktivitas, membuat implementasi tidak optimal di sekolah dengan dukungan rendah (Tomasouw et al., 2024; Solehudin et al., 2024). Hal ini krusial karena Kurikulum Merdeka menawarkan ruang kreativitas luas, tapi tanpa sumber daya, ia berpotensi jadi beban tambahan bagi guru. Literatur internasional juga mengonfirmasi ketergantungan keberhasilan kurikulum pada sistem pendukung, bukan hanya dokumen kebijakan (Hunaepi & Suharta, 2024). Di konteks khusus, seperti pendidikan kebutuhan khusus atau pendidikan agama, tantangan meluas ke literasi digital rendah dan infrastruktur tidak memadai, yang menghambat integrasi teknologi pedagogis (Mahmud et al., 2025; Simbolon et al., 2025). Selain itu, ketidakmerataan akses fasilitas antarwilayah urban-rural memperburuk disparitas, dengan sekolah pedesaan sering kekurangan media pengajaran untuk diferensiasi (Baharuddin & Burhan, 2025; Nisa et al., 2023). Temuan ini menekankan perlunya intervensi holistik untuk mengatasi hambatan struktural, termasuk alokasi anggaran yang lebih adil dari pemerintah pusat dan daerah. Studi kasus di wilayah seperti Makassar menunjukkan bahwa meskipun program revolusi pendidikan diintegrasikan, hambatan infrastruktur tetap menjadi penghalang utama (Studi Kasus Implementasi Kurikulum Merdeka, 2024).

Pada hambatan asesmen, literatur menyoroti kesulitan guru dalam beralih ke asesmen diagnostik dan formatif, sering kali karena kurangnya pelatihan dan interpretasi data (Rahmadani et al., 2025; Suprpti & Ridho, 2024). Ini berdampak pada esensi kurikulum yang berpihak siswa, di mana asesmen seharusnya menjadi alat perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar evaluasi akhir. Beberapa penelitian menemukan bahwa guru masih bergantung pada penilaian tradisional, yang bertentangan dengan prinsip Kurikulum Merdeka, sehingga mengurangi motivasi siswa (Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka, 2025). Sementara itu, hambatan manajerial mencakup dukungan kepemimpinan lemah dan ukuran kelas besar, yang menghalangi adopsi merata (Fazilla & Lisa, 2025; Yusa et al., 2023). Di tingkat kebijakan, kejutan kebijakan (policy shock) tanpa transisi yang memadai sering kali menyebabkan kebingungan, terutama di sekolah dengan sumber daya terbatas (Azzahra & Rahmadhani, 2025). Secara keseluruhan, sintesis ini menggarisbawahi urgensi reformasi sistemik untuk memaksimalkan potensi Kurikulum Merdeka, termasuk penguatan kolaborasi antarstakeholder untuk mengatasi hambatan multidimensi ini. Studi literatur sistematis menunjukkan bahwa tantangan utama seperti keterbatasan waktu dan SDM guru menjadi pola berulang, yang memerlukan strategi adaptif (The Implementation of Merdeka Curriculum, 2025). Dengan demikian, implementasi kurikulum ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya administratif tetapi juga transformatif, mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi sekolah (Yuliana et al., 2025; Implementasi Konsep CILUKBA, 2025).

### 3. Hambatan Dominan pada Kompetensi Guru, Asesmen, dan Sarana Prasarana

#### 1) Hambatan Kompetensi Guru dan Pembelajaran Berdiferensiasi

Literatur menunjukkan bahwa hambatan dominan pada aspek kompetensi guru terkait dengan pemahaman karakteristik Kurikulum Merdeka dan kemampuan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam praktiknya, pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru mampu menyesuaikan konten, proses, dan produk belajar berdasarkan kebutuhan peserta didik. Akan tetapi, sejumlah penelitian menemukan bahwa guru masih kesulitan merancang variasi aktivitas belajar karena keterbatasan waktu, beban administratif, serta minimnya pendampingan teknis. Hambatan ini berpotensi menyebabkan implementasi Kurikulum Merdeka menjadi formalitas, yakni sekadar mengganti perangkat administrasi tanpa perubahan nyata dalam praktik pembelajaran. Temuan tersebut selaras dengan hasil kajian yang menyoroti bahwa tantangan terbesar Kurikulum Merdeka terletak pada kesiapan guru sebagai pelaksana utama perubahan kurikulum (Fauzia & Ramadan, 2023).

Selain itu, beberapa literatur juga mencatat adanya “kejutan kebijakan” (policy shock), yaitu perubahan kebijakan yang cepat tanpa adanya proses transisi yang merata. Di beberapa sekolah, guru mengalami kesulitan memahami modul ajar, proyek P5, dan struktur capaian pembelajaran yang berbeda dari kurikulum sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu adaptasi yang tidak singkat. Kondisi ini berdampak pada ketidakseragaman kualitas implementasi antar sekolah (Nisa et al., 2023) & (Azzahra & Ramdhani, 2025).

#### 2) Hambatan Asesmen: Diagnostik, Formatif, dan Penggunaan Data Belajar

Hambatan lain yang dominan adalah aspek asesmen. Kurikulum Merdeka menekankan asesmen diagnostik dan formatif sebagai dasar pemetaan kebutuhan peserta didik. Namun, literatur menunjukkan bahwa banyak guru masih memaknai asesmen sebagai tes hasil belajar, bukan sebagai alat perbaikan proses belajar. Kesulitan ini tampak pada rancangan instrumen asesmen formatif yang belum beragam dan pada ketidaksiapan guru menafsirkan data asesmen untuk tindak lanjut pembelajaran. Dalam studi kepustakaan tentang asesmen Kurikulum Merdeka, ditemukan bahwa tantangan terbesar guru berada pada kemampuan menyusun indikator, menetapkan kriteria keberhasilan, dan mengintegrasikan asesmen formatif secara konsisten dalam pembelajaran (Rahmadani & Sofa, 2025).

Jika tidak diselesaikan, hambatan asesmen dapat berdampak pada hilangnya esensi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Sebab, asesmen diagnostik dan formatif seharusnya menjadi “mesin utama” pembelajaran berdiferensiasi; tanpa asesmen yang kuat, diferensiasi berpotensi menjadi pendekatan yang sulit dieksekusi secara nyata (Marfu'ah et al., 2025).

#### 3) Hambatan Sarana-Prasarana dan Kesenjangan Kesiapan Sekolah

Hambatan sarana-prasarana muncul sebagai masalah yang sangat nyata, terutama berkaitan dengan keterbatasan akses teknologi, sumber belajar, serta fasilitas pembelajaran yang mendukung pembelajaran aktif. Beberapa

penelitian menyebut bahwa sekolah dengan keterbatasan fasilitas cenderung kesulitan melaksanakan proyek P5 karena membutuhkan alat, ruang, dan pendampingan yang tidak selalu tersedia. Kesenjangan ini menimbulkan risiko ketidakmerataan kualitas implementasi, sebab sekolah yang memiliki sumber daya baik akan lebih cepat beradaptasi, sementara sekolah dengan sumber daya rendah akan tertinggal. Kajian yang mengidentifikasi tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar secara eksplisit menyebut sarana sebagai hambatan inti bersama kesiapan guru dan asesmen formatif (Azzahra & Rahmadhani, 2025).

#### 4. Sintesis Rekomendasi Strategis dari Literatur

Berdasarkan sintesis literatur nasional dan internasional periode 2021–2025, terdapat tiga rekomendasi utama yang konsisten muncul sebagai solusi untuk mengatasi hambatan implementasi Kurikulum Merdeka. Rekomendasi ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap tantangan yang ada, tetapi juga proaktif dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih adaptif dan inklusif. Dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai studi, rekomendasi ini menekankan pendekatan holistik yang melibatkan guru, sekolah, dan pemangku kebijakan. Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka bergantung pada komitmen jangka panjang untuk transformasi sistemik, bukan sekadar perubahan administratif sementara.

Pertama, penguatan pengembangan profesional guru harus diarahkan pada pelatihan yang bersifat praktis, berkelanjutan, dan kontekstual, khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi, penyusunan modul ajar, serta pemanfaatan asesmen formatif. Banyak literatur menekankan bahwa pelatihan satu kali saja tidak memadai, karena perubahan kurikulum ini bersifat kompleks dan memerlukan proses pendampingan intensif hingga guru benar-benar mahir menerapkannya di kelas (Fauzia & Ramadan, 2023). Misalnya, guru sering kali kesulitan dalam merancang aktivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam, sehingga diperlukan workshop berbasis praktik dan komunitas belajar untuk berbagi pengalaman. Selain itu, pelatihan harus mencakup pengembangan literasi digital, mengingat Kurikulum Merdeka menuntut integrasi teknologi dalam pembelajaran (Marfu'ah et al., 2025). Studi lain menambahkan bahwa pelatihan struktural ini dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan dengan membangun kepercayaan diri guru melalui simulasi dan umpan balik berkelanjutan (Aziz et al., 2025). Pendekatan ini juga direkomendasikan untuk guru di daerah terpencil (3T), di mana akses pelatihan terbatas, sehingga memerlukan program daring dan lokakarya berjenjang untuk meningkatkan kapasitas secara bertahap (Tomasouw et al., 2024). Dengan demikian, investasi pada pengembangan guru bukan hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

Kedua, peningkatan dukungan sistem dan sumber daya sekolah menjadi prasyarat esensial agar implementasi kurikulum tidak bergantung semata pada kemampuan guru individu. Rekomendasi literatur mendorong penguatan kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk mengoptimalkan platform digital pembelajaran serta menyediakan sumber belajar kontekstual guna menutup kesenjangan fasilitas antar sekolah (Nisa et al., 2023). Hal ini krusial karena ketimpangan sarana-prasarana sering kali menghambat pelaksanaan proyek berbasis aktivitas, terutama di sekolah dengan sumber daya rendah. Sebagai contoh, distribusi sumber daya yang merata, seperti alat teknologi dan bahan ajar digital, dapat memastikan bahwa Kurikulum Merdeka tidak menciptakan ketidakadilan, melainkan mendorong pemerataan mutu pendidikan (Azzahra & Rahmadhani, 2025). Literatur juga menyarankan pembentukan komunitas belajar untuk berbagi sumber daya, yang dapat mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan kolaborasi lintas sekolah (Aziz et al., 2025). Di konteks pendidikan agama, seperti di sekolah Katolik, rekomendasi menekankan distribusi sumber daya kurikulum yang adil untuk mendukung integrasi nilai-nilai keagamaan dalam pembelajaran (Simbolon et al., 2025). Selain itu, dukungan institusional diperlukan untuk mempertahankan implementasi berkelanjutan, termasuk alokasi anggaran untuk fasilitas dan pemeliharaan (Yuliana et al., 2025). Intervensi ini akan memastikan bahwa kurikulum berfungsi sebagai alat pemulihan pascapandemi tanpa memperlum sekolah yang sudah rentan.

Ketiga, perbaikan manajemen implementasi kebijakan harus dilakukan melalui komunikasi yang lebih jelas, panduan fleksibel, dan mekanisme evaluasi adaptif. Beberapa literatur menekankan bahwa sekolah membutuhkan panduan implementasi yang ringkas, mudah dipahami, dan dapat disesuaikan dengan konteks lokal untuk menghindari kebingungan (Situmorang et al., 2025). Evaluasi tidak boleh terbatas pada kepatuhan administratif, melainkan harus menilai perubahan praktik pembelajaran dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa, seperti peningkatan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotor (Yuliana et al., 2025). Di daerah 3T, persiapan komprehensif sebelum pelaksanaan wajib, termasuk mekanisme pendampingan untuk mengatasi kurangnya literasi digital (Tomasouw et al., 2024). Rekomendasi juga mencakup integrasi umpan balik dari guru untuk menyempurnakan kebijakan, sehingga kurikulum menjadi instrumen reformasi yang efektif, bukan hanya

pergantian dokumen (Solehudin et al., 2024). Dengan menerapkan rekomendasi ini, Kurikulum Merdeka dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil review literatur terhadap berbagai publikasi ilmiah tahun 2021–2025, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah masih menghadapi hambatan yang bersifat sistemik dan berulang dalam berbagai konteks satuan pendidikan. Hambatan utama yang paling sering muncul dalam literatur meliputi: (1) keterbatasan pemahaman dan kompetensi guru dalam menerjemahkan prinsip Kurikulum Merdeka ke dalam praktik pembelajaran, terutama terkait pembelajaran berdiferensiasi dan penyusunan modul ajar; (2) keterbatasan sarana-prasarana dan sumber daya pendukung yang menyebabkan kesenjangan kesiapan antar sekolah; serta (3) kendala dalam pelaksanaan asesmen diagnostik dan formatif karena pergeseran paradigma penilaian belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh guru. Selanjutnya, kajian ini menemukan bahwa hambatan dominan yang menentukan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka berkaitan erat dengan tiga aspek kunci, yaitu kapasitas guru, ketepatan praktik asesmen, dan ketersediaan dukungan fasilitas serta manajemen sekolah. Ketiga aspek tersebut saling terkait: pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan asesmen formatif yang kuat, sementara keduanya memerlukan dukungan sumber daya serta pendampingan yang memadai. Karena itu, literatur menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak cukup ditopang oleh dokumen kebijakan, tetapi harus disertai penguatan kapasitas pelaksana dan sistem pendukung secara merata. Akhirnya, penelitian ini merangkum bahwa solusi yang paling konsisten direkomendasikan oleh literatur adalah: (1) penguatan pelatihan dan pendampingan guru yang bersifat praktis, berkelanjutan, dan kontekstual; (2) peningkatan dukungan sarana-prasarana serta penyediaan sumber belajar yang lebih merata; dan (3) perbaikan manajemen implementasi kebijakan melalui komunikasi kebijakan yang lebih jelas dan evaluasi yang menekankan perubahan praktik pembelajaran, bukan sekadar kepatuhan administratif. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat lebih efektif menjadi instrumen pemulihan pembelajaran dan pemerataan mutu pendidikan, terutama jika strategi implementasinya benar-benar memperhatikan kesiapan sekolah yang sangat beragam.

#### Referensi

1. Azzahra, I. F., & Rahmadhani, R. (2025). Kurikulum Merdeka: Telaah Potensi Dan Tantangan Implementatif Dalam Mewujudkan Pendidikan Fleksibel Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(3).
2. Fauzia, R., & Ramadan, Z. H. (2023). Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 9(3), 1608-1617.
3. Hunaepi, H., & Suharta, I. (2024). Transforming Education In Indonesia: The Impact And Challenges Of The Merdeka Belajar Curriculum. *Path Of Science*, 10(6), 5026-5039.
4. Marfu'ah, S., Retnawati, H., & Arliani, E. (2025). Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah: Sebuah Tinjauan Tentang Evaluasi. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(3 Agustus), 4145-4154.
5. Nisa, S. K., Yoenanto, N. H., & Nawangsari, N. A. F. (2023). Hambatan Dan Solusi Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Jenjang Sekolah Dasar: Sebuah Kajian Literatur. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 12(3), 287-298.
6. Pratami, W., Charolina, A. D., Nirwana, E. S., Maharani, W. I., Heriyani, R., & Dewi, R. M. (2025). Tantangan Dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar: Studi Literatur Kualitatif. *Jurnal Basicedu*, 9(6), 1739–1747. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i6.10806>
7. Rahmadani, Rahayu, N. A., & Sofa Ira Maya A. (2025). ASESMEN PEMBELAJARAN DALAM KURIKULUM MERDEKA: KESULITAN DAN TANTANGAN GURU. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(02), 220-233.
8. Situmorang, W. R., Situmorang, J., Nainggolan, G. P., Purba, M., & Siboro, D. V. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Indonesia: Sebuah Studi Literatur Tentang Peluang Dan Tantangan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 14154-14159.
9. Snyder, H. (2019). Literature Review As A Research Methodology: An Overview And Guidelines. *Journal Of Business Research*, 104, 333-339.
10. Solehudin, R. H., Budiarti, E., Jannah, R. R., & Chaedar, A. (2024). Analysis Of The Implementation Of The Merdeka Curriculum Policy In Senior High Schools: A Case Study On The Practice Level Of Learning. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 11(2), 23-31.
11. Suprpti, D., & Ridho, A. R. (2024). Asesmen Diagnostik Sebagai Penilaian Pembelajaran Dalam Kurikulum Merdeka Di MIN 2 Boyolali. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 1(2), 253-263.
12. Aziz, A., Mukti, H., Rahmawati, B. F., & Hadi, Y. A. (2025). Implementation of Merdeka Curriculum Concept, Challenges and Benefits in Elementary School Education. *Interdisciplinary Journal of Education*, 3(2), 148–156. <https://doi.org/10.61277/ije.v3i2.210>
13. Baharuddin & Burhan. (2025). Urban and rural teacher perspectives on Indonesian educational reform: challenges and policy implications. *Cogent Education*, 12. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2497142>
14. Fazilla, S., & Lisa, D. D. S. (2025). Exploring the implementation and challenges of the Indonesian curriculum: Pathways to effective education reform. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 15(4), 193-215. <https://doi.org/10.47750/pegog.15.04.18>
15. Mahmud, N. A., Jabu, B., & Korompot, C. A. (2025). The implementation of the Merdeka curriculum in English teaching at SMAN 3 Pangkep. *International Journal of Business, English, and Communication*, 3(1), 11–15.

16. Nissa, M., & Sagita, V. C. (2025). Challenges in implementing the Merdeka curriculum in junior high schools: A systematic literature review. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(12). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
17. Simbolon, E., Tibo, P., & Bere, H. (2025). Challenges faced by teachers in implementing the Merdeka curriculum for Catholic religious education. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 17(1), 256–269. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i1.6580>
18. Tomasouw, J., Marantika, J. E. R., Wenno, E. C., & van Delzen, J. C. N. (2024). The challenges of the Kurikulum Merdeka implementation in 3T area. *KnE Social Sciences*, 9(31), 359–377. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i31.17598>
19. Yuliana, Rustan, Wisran, & Kartini. (2025). The implementation of Merdeka Belajar curriculum: Impact toward students' learning outcomes at Islamic Middle School. *Indonesian Journal of Research and Educational Review*, 4(4), 1380-1398. <https://doi.org/10.51574/ijrer.v4i4.3766>
20. Yusa, I. M., Yusuf, M., Rahman, A., Aniati, & Supriyanto, D. (2023). The challenges and opportunities of Kurikulum Merdeka implementation in Indonesian schools. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 2(2), 364-382. <https://felifa.net/index.php/INJOE/article/view/155>